

ANALISIS AKAR KONFLIK SAMPIT MELALUI TEORI DEPRIVASI

Frisca Alexandra

*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman*

e-mail : frisca.alexandra2108@gmail.com

ASBTRACT

One of the most vulnerable issues to be the trigger for conflict is the issue of identity. The sense of identity can quickly turn into a response to threats. The response to these threats will often end up in conflict. Ethnicity is one of the dimension of identity. Ethnic conflicts often show that ethnicity is the cause of the outbreak of conflict but the root causes of ethnic conflict can not be seen from a single factor because ethnic conflict is a fairly complex conflict. Sampit conflict is one of the conflicts involving ethnicity occurring in Indonesia but this conflict certainly can not be viewed solely as a conflict between ethnic Dayaks and Madurese, using the approach of Theory of Deprivation by Robert Ted Gurr, the various allegations of the outbreak of ethnic conflict in Sampit actually led at one conclusion that there has been a deprivation within society that causes the community to feel frustrated and ultimately to act aggression. To find out and analyze the deprivation condition that occurred in Sampit first we must know and understand about the situation and conditions in Sampit before the conflict broke out in 2001. The exposure will be focused on the social, political, economic and cultural conditions of the people of Central Kalimantan, especially between the two conflicting ethnic groups that are ethnic Dayaks and Madurese.

Keywords: *Root Conflict, Deprivation, Sampit Conflict*

Salah satu isu yang paling rentan menjadi pemicu konflik adalah isu mengenai identitas. Rasa identitas dapat cepat berubah menjadi respon terhadap ancaman. Respon terhadap ancaman ini tidak jarang akan berakhir menjadi konflik. Etnis termasuk dalam salah satu dimensi identitas. Konflik etnis kerap kali menunjukkan bahwa etnisitas adalah penyebab pecahnya konflik namun akar-akar penyebab konflik etnis tidak bisa dilihat dari satu faktor karena konflik etnis adalah suatu konflik yang cukup kompleks. Konflik Sampit adalah salah satu konflik yang melibatkan etnisitas yang terjadi di Indonesia namun konflik ini tentu saja tidak bisa dipandang semata sebagai konflik antara etnis Dayak dan Madura, dengan menggunakan pendekatan Teori Deprivasi oleh Robert Ted Gurr, berbagai dugaan penyebab pecahnya konflik etnis di Sampit sesungguhnya mengarah pada satu kesimpulan bahwa telah terjadi deprivasi didalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa frustrasi dan akhirnya melakukan tindakan agresi. Untuk mengetahui dan menganalisa kondisi deprivasi yang terjadi di Sampit terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami tentang situasi dan kondisi di Sampit sebelum konflik pecah pada tahun 2001. Paparannya sendiri akan dititik beratkan pada kondisi sosial, politik, ekonomi dan juga budaya masyarakat Kalimantan Tengah terutama diantara kedua etnis yang bertikai yakni etnis Dayak dan Madura.

Kata Kunci: *Akar Konflik, Deprivasi, Konflik Sampit*

Pendahuluan

Konflik adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Mengutip pernyataan kaum Realis yang mengatakan bahwa, manusia memiliki kecenderungan untuk selalu berkonflik dengan manusia lainnya. Hal ini karena manusia terlahir dengan sifat agresif didalam dirinya. Konflik sendiri dapat muncul karena adanya suatu isu utama yang dapat menjadi pemicu pecahnya suatu konflik. Isu tersebut bisa mengenai kekuasaan, budaya, identitas, gender dan juga isu mengenai hak. Namun salah satu isu yang paling rentan menjadi pemicu konflik adalah isu mengenai identitas. Isu mengenai identitas sendiri mencakup berbagai dimensi didalamnya yakni mengenai suku, budaya, bahasa, etnis hingga ras. Isu identitas kerap kali menjadi isu yang mendasari pecahnya suatu konflik, terutama konflik intranasional atau internal.

Rasa identitas dapat cepat berubah menjadi respon terhadap ancaman, baik yang secara nyata ataupun yang dirasakan dan tidak jarang, respon terhadap ancaman ini akan berakhir menjadi konflik. Menurut ilmu sosiologi manusia cenderung menempatkan individu ataupun kelompok dalam suatu kategori yang nantinya akan menciptakan suatu stereotip, dan tidak jarang stereotip ini menghasilkan suatu pemikiran yang tidak akurat karena dibuat berdasarkan informasi yang tidak sempurna. Etnis termasuk dalam salah satu dimensi identitas, hal ini karena kita sering menggambarkan identitas kita menurut kelompok-kelompok tertentu dimana kita menjadi bagian didalamnya dan merasa memiliki kesamaan dengan individu-individu lainnya yang tergabung didalamnya. Etnis sendiri adalah suatu kelompok dimana didalamnya terdapat kesamaan bahasa, budaya, agama dan juga ras tertentu dan jika kelompok ini mendapatkan ancaman dari kelompok etnis lainnya, hal ini kerap kali akan pecah menjadi suatu konflik yang disebut juga dengan konflik etnis.

Konflik etnis kerap kali menunjukkan bahwa etnisitas adalah penyebab pecahnya konflik namun Robert Tedd Gurr beranggapan bahwa konflik etnis lebih disebabkan oleh gagalnya institusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya sehingga terjadi kesenjangan baik secara ekonomi maupun sosial politik antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya (Robert Ted Gurr, 1970:112). Sehingga dengan kata lain, akar-akar penyebab konflik etnis tidak bisa dilihat dari satu faktor karena konflik etnis adalah suatu konflik yang cukup kompleks.

Di Indonesia sendiri, konflik komunal dalam skala besar yang berlandaskan etnisitas hingga agama terjadi selama masa transisi demokrasi yang dimulai sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri ditahun 1998. Beberapa provinsi di Indonesia diguncang oleh konflik komunal yang menewaskan ratusan hingga ribuan korban jiwa. Konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah atau yang lebih dikenal dengan konflik Sampit menjadi salah satu konflik komunal yang berlandaskan etnisitas dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar.

Konflik etnis di Sampit, Kalimantan Tengah tidak pernah terjadi hingga dekade tahun 60-an. Kondisi di Kalimantan Tengah yang terbuka dan semakin berkembangnya pembangunan turut berperan meningkatkan intensitas konflik. Sebelum konflik yang pecah ditahun 2001, sebelumnya telah terjadi beberapa

insiden konflik di Kalimantan Tengah, antara lain (www.crisisgroup.org, diakses pada tanggal 2 Juli 2018) :

1. Tahun 1972, seorang gadis dayak diperkosa oleh pemuda madura. Terhadap kejadian ini diadakan penyelesaian secara damai melalui hukum adat
2. Tahun 1982, terjadi tindakan pembunuhan oleh orang madura terhadap orang dayak. Pelaku tidak tertangkap dan tidak dilakukan pengusutan atau penyelesaian secara hukum yang berlaku.
3. Tahun 1996 di Palangkaraya, seorang gadis dayak diperkosa dan dibunuh oleh pemuda madura di bioskop Panala, namun pelaku hanya mendapatkan hukuman yang ringan.
4. Tahun 1997, dua orang pemuda dayak dikeroyok oleh sekumpulan pemuda madura, hingga menyebabkan sekumpulan pemuda madura tersebut meninggal dunia dan dua orang pemuda dayak pun mendapatkan hukuman yang berat.
5. Tahun 2000, konflik kembali terjadi, kali ini seorang pemuda dayak kembali menjadi korban aksi kejahatan seorang preman madura.
6. Desember tahun 2000, pemuda dayak di desa kasongan, kabupaten kotawaringin timur kembali menjadi korban dari sekelompok pemuda Madura
7. Hingga pada Februari 2001, konflik sampit pun pecah. Konflik yang awalnya bermula di kota sampit ini kemudian meluas hingga keseluruh wilayah di provinsi kalimantan tengah termasuk ibu kota provinsi Palangkaraya. Konflik ini menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia dan ribuan warga madura harus kehilangan tempat tinggal mereka dan juga banyak masyarakat madura yang meninggal dengan cara yang tragis yakni dipotong kepalanya.

Tulisan ini akan memaparkan mengenai situasi dan kondisi di Sampit sebelum konflik pecah pada tahun 2001. Paparan akan dititik beratkan pada kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Kalimantan Tengah terutama diantara kedua etnis yang bertikai yakni etnis Dayak dan Madura. Latar belakang dugaan penyebab terjadinya konflik etnis sendiri dapat berangkat dari berbagai macam faktor seperti dugaan bahwa konflik etnis disebabkan karena adanya sebagian pihak yang menggunakan isu SARA sebagai pemicunya.

Stereotipe negatif antara etnis yang satu dengan etnis lainnya kerap kali menjadi dasar bagi pecahnya konflik etnis. Stereotipe sendiri kerap kali berhubungan dengan kelompok minoritas, rasial, agama maupun kondisi ekonomi. Stereotipe merupakan bentuk emosional yang mudah tertanam secara mendalam di dalam perasaan suatu individu. Biasanya, stereotipe muncul sebagai hasil generalisasi secara sempit. Broom dalam Agus Surata (2001:52) mengatakan bahwa stereotipe adalah pandangan yang disederhanakan terhadap anggota suatu kelompok tertentu dan dalam konflik etnis berarti masyarakat dalam suatu kelompok etnis tertentu yang mengabaikan keanekaragaman karakteristik dari kelompok etnis tersebut. Sementara menurut Prof. Dr. AB. Tangdililing mengatakan bahwa munculnya stereotipe disebabkan karena faktor budaya. Pandangan sekelompok masyarakat dari etnis tertentu menurut budayanya akan menentukan stereotipe bagi etnis lainnya. Jika ada budaya yang berbeda maka pada saat itulah timbul stereotipe (Agus Surata, 2001:52).

Sementara itu ada pula yang menilai bahwa konflik etnis dapat terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, integrasi nasional yang lemah, pertentangan diantara para elit politik, pertentangan primordial, ketidakadilan penyelenggaraan pemerintahan, ketidakadilan penerapan dan penegakan hukum serta ketimpangan sosial dan sistem nilai dan orientasi budaya diantara etnis yang berbeda yang telah lama terpendam. Berbagai hal tersebut dapat menjadi

akar masalah dari suatu konflik. Namun ada pula yang memperkirakan bahwa konflik etnis terjadi sebagai reaksi emosional masyarakat terhadap berbagai penyimpangan birokrasi pemerintahan seperti ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan, korupsi, nepotisme, kolusi dan ketidakadilan hukum, ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang sebelumnya pernah terjadi serta adanya berbagai kepentingan yang berbeda.

Berbagai dugaan penyebab pecahnya konflik etnis sesungguhnya mengarah pada satu kesimpulan bahwa terjadi deprivasi didalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa frustrasi dan akhirnya melakukan tindakan agresi. Deprivasi adalah suatu kondisi dimana terjadi kesenjangan antara harapan dengan kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhannya. Ada tiga jenis deprivasi menurut Robert Ted Gurr (1970:125), yakni *Pertama, Incremental Deprivation* yakni suatu kondisi dimana tingkat harapan konstan, tetapi kemampuan untuk memenuhinya merosot. Sehingga timbul kesenjangan antara harapan akan nilai dan kemampuan sistem untuk memenuhinya. Rasa frustrasi muncul karena kehilangan kemampuan yang semula dimiliki atau akibat kemerosotan kemampuan untuk memenuhi harapan di masa depan.

Kedua, Aspirational Deprivation yakni Adanya peningkatan harapan yang tidak bisa diimbangi oleh kemampuan pemenuhannya. Rasa frustrasi muncul akibat ketidakmampuan memenuhi harapan yang baru saja dikembangkan. Adapun hal yang mendorong peningkatan harapan itu? [a] efek demonstratif dari cara hidup baru; [b] ideologi/keyakinan baru; dan [c] dampak perbaikan status-ekonomi-sosial. *Ketiga, Progressive Deprivation* atau dikenal juga dengan “J-Curve Hypothesis”, suatu kondisi dimana harapan akan nilai meningkat secara progresif dan hal ini pada awalnya diikuti oleh peningkatan kemampuan sistem untuk memenuhi harapan yang selalu meningkat itu. Namun pada suatu titik waktu, kemampuan sistem untuk memenuhi tuntutan baru, yang terus saja meningkat, mengalami kemerosotan. Akibatnya, timbullah deprivasi yang sangat parah.

Untuk mengetahui kondisi deprivasi seperti apa yang terjadi di Kalimantan Tengah hingga menyebabkan pecahnya konflik etnis pada tahun 2001, penulis akan menelaah lebih lanjut mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berlangsung di Kalimantan Tengah, terutama diantara kedua etnis yang bertikai yakni Dayak dan Madura.

Kondisi Sosial–Budaya Etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah

Kebudayaan yang berbeda kerap kali dijadikan dasar penyebab timbulnya suatu konflik dalam masyarakat yang memiliki perbedaan sosial budaya. Ketidakcocokan karakter diantara mereka menjadikan hubungan antara kedua etnis mudah menjadi suatu konflik. Kecurigaan dan kebencian yang berasal dari stereotip negatif membuat hubungan kedua etnis menjadi tegang dan tidak harmonis. Warga etnik Madura yang merupakan etnis minoritas di Kalimantan Tengah dan berada di tengah-tengah suku Dayak yang merupakan warga asli dan juga etnis mayoritas, etnis Madura dikenal sebagai masyarakat yang senang bekerja keras sekaligus memiliki loyalitas dan solidaritas terhadap kelompok etnis nya yang begitu kuat.

Akan tetapi, warga Madura dirasakan belum mampu melakukan akulturasi budaya dengan suku Dayak, sehingga dimata orang-orang Dayak, masyarakat Madura dianggap sebagai orang asing. Di Kalimantan Tengah sendiri sesungguhnya terdapat begitu banyak warga pendatang, tidak hanya etnis Madura yang bermukim dan mencari nafkah di Kalimantan Tengah tetapi ada juga suku-suku lain seperti Jawa, Bugis, Minangkabau, Melayu, Banjar, Batak dan lain sebagainya. Menurut Soemardjan (2001), suku-suku lain yang juga merupakan warga pendatang layaknya etnis Madura, pandai berakulturasi dengan suku Dayak, sehingga mereka dapat bekerjasama atau setidaknya berkoeksistensi dengan suku Dayak yang merupakan etnis Mayoritas.

Hubungan masyarakat Madura dengan beberapa warga masyarakat lainnya di Kalimantan Tengah sendiri sangat beragam. Hubungan masyarakat Madura dengan masyarakat Bugis diwarnai sikap kerja sama dan saling menjaga diri. Hubungan masyarakat Madura dengan masyarakat Melayu terjalin cukup erat, hal ini karena adanya persamaan agama diantara mereka. Hubungan masyarakat Madura dengan masyarakat Cina lebih merupakan hubungan dalam bidang ekonomi, baik itu antara penjual dan pembeli atau pun antara bos dan anak buah. Sementara hubungan antara masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak memang diwarnai dengan prasangka, rasa curiga serta stereotipe negatif.

Warga Madura hidup mengelompok sesama warga madura sendiri, hampir sebagian besar dari mereka hidup dalam desa-desa yang terpisah dari etnis-etnis lainnya. Pusat komuniti masyarakat Madura adalah tempat ibadah mereka, tempat ibadah ini dapat berupa langgar atau mushalla dan dapat pula berupa masjid dan pesantren. Tempat ibadah ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Madura, karena pemimpin dari tempat ibadah ini adalah warga Madura dan bahasa yang digunakan pada saat menyampaikan khotbah saat sholat juga menggunakan bahasa Madura. Selain itu, masyarakat Madura memiliki orientasi kebudayaan keluar, karena daerah asal mereka merupakan daerah yang kering dan gersang maka kebudayaan suku Madura mengajarkan ketekunan serta keberanian untuk bertahan hidup.

Masyarakat Madura menganggap bahwa lahan yang dapat mereka gunakan untuk bertahan hidup, tidak hanya terbatas di Pulau Madura saja, tetapi daerah-daerah diseberang lautan pun layak mereka jadikan sebagai sumber penghidupan. Masyarakat Madura yang pergi merantau sebagian karena terpaksa sebab sumber penghidupan mereka yakni lahan, benar-benar sempit, sedang sebagian lainnya karena memiliki watak yang dinamis, mandiri serta berani meluaskan lingkungan hidupnya (Soemardjan, 2001).

Suku Dayak merupakan suku asli Kalimantan. Warga suku Dayak sebagian besar tinggal dipedalaman yang jauh dari penduduk lain. Suku Dayak juga terdiri dari beberapa sub suku lagi seperti Dayak Iban, Dayak Kendayan, Dayak Punan dan lain sebagainya. Suku Dayak memiliki ciri-ciri kebudayaan primordial. Dalam tata hidupnya, suku Dayak berorientasi pada dirinya sendiri. Suku Dayak percaya bahwa hubungan yang harus dibangun tidak hanya hubungan antara sesama manusia tetapi juga antara manusia dan roh-roh manusia yang telah meninggal. Dalam rangka kebudayaan, kepercayaan, dan adat istiadat, suku Dayak memiliki sikap ramah tamah, penuh toleransi dan tenggang rasa dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tetapi apabila ada pihak lain yang melanggar adat istiadat mereka, maka dengan sendirinya hal tersebut telah merusak hubungan mereka dengan roh-roh leluhur mereka dan mereka tidak

segan-segan melakukan tindak kekerasan sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan roh-roh tersebut (Ruslikan, 1999).

Penghormatan terhadap roh-roh nenek moyang dalam kebudayaan suku Dayak disebut Kaharingan, yakni suatu sikap pemujaan kepada roh-roh leluhur bercampur dengan unsur-unsur animisme. Kepercayaan Kaharingan ini bertujuan untuk mencapai ketentraman lahir dan batin serta kesempurnaan hidup didunia dan akhirat. Selain sikap penghormatan terhadap roh-roh leluhur mereka yang telah meninggal, warga Dayak juga percaya bahwa hutan adalah cerminan dari tuhan mereka yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Sehingga mereka percaya bahwa hancurnya hutan akan menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka dan bahwa tuhan akan mengutuk mereka atas semua perbuatan penghancuran hutan tersebut. Bagi masyarakat Dayak, lahan atau tanah yang mereka miliki merupakan warisan leluhur yang harus mereka pertahankan namun kerap kali karena rendahnya tingkat pendidikan warga Dayak, mereka menjadi korban tipu daya masyarakat pendatang yang ingin menguasai lahan mereka. Perilaku dan tindakan masyarakat pendatang ini, khususnya warga Madura yang memang merantau untuk mencari lahan sebagai penyambung hidup telah menimbulkan sentimen sendiri bagi orang dayak yang menganggap orang madura sebagai pencuri dan penjarah tanah milik mereka. Sentimen ini ditambah pula dengan rasa cemburu karena masyarakat Madura berhasil mengelola tanah tersebut dan berkat kerja keras mereka telah menjadikan mereka sukses dalam bisnis pertanian (Ruslikan, 1999).

Secara perlahan masyarakat Dayak, merasa termarginalisasi dan terpinggirkan ditanah mereka sendiri. Hal ini tidak hanya, karena warga pendatang yang lebih sukses dari mereka serta lahan dan tanah mereka yang kerap kali direbut oleh warga pendatang tetapi juga karena kesenjangan perlakuan aparat birokrasi dan aparat hukum. Menurut masyarakat Dayak, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang diskriminatif karena telah mengeksploitasi kekayaan alam mereka terutama hutan sementara penegakan hukum yang berlaku di Kalimantan Tengah tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Masyarakat Dayak kerap kali merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang lebih memihak kepada masyarakat Madura apabila masyarakat Madura melakukan pelanggaran hukum. Hal ini terlihat dari serangkain tindak kekerasan yang melibatkan kedua etnis ini dengan diakhiri tewasnya warga dari salah satu etnis dan jika etnis madura yang menjadi korban, maka warga dayak akan mendapatkan hukuman yang berat sementara jika warga dayak yang menjadi korban maka etnis madura hanya akan diberikan hukuman yang ringan dan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Tercatat, pelanggaran terhadap hukum meningkat rata-rata sebesar empat kali pada tahun 2000 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan 45% pelanggaran terhadap hukum tersebut dilakukan oleh masyarakat pendatang terutama suku Madura (Syarif Ibrahim Alqadri, 2004:167).

Ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat dayak, telah menimbulkan rasa kecewa yang mendalam bagi masyarakat dayak. Sehingga saat, konflik laten telah tereskalasi menjadi konflik terbuka, masyarakat dayak memilih untuk main hakim sendiri dan menggunakan kekerasan untuk mencari keadilan. Faktor perbedaan budaya yang tercermin dalam sistem nilai budaya dan sistem orientasi

budaya antara masyarakat dayak dan madura memang memiliki potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Menurut Crawford (1998) hal ini terjadi karena institusi-institusi yang bertugas melakukan kontrol seperti institusi hukum, militer serta kepolisian tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi potensi-potensi yang cenderung mendiskreditkan suatu etnis atau kultur tertentu sehingga potensi tersebut berkembang menjadi konflik.

Kondisi Ekonomi Etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah

Selain kondisi budaya yang berbeda dan tidak dapat berbaur dengan baik antara satu etnis dengan etnis lainnya hingga menyebabkan timbulnya stereotip negatif serta rasa benci dan curiga, faktor kondisi ekonomi dianggap juga turut menjadi akar konflik Sampit. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi merupakan dasar dari munculnya atau tereskalasinya suatu konflik (Simon Fisher, 2009:12), dan kebutuhan seseorang untuk memenuhi ataupun meningkatkan kesejahteraannya dalam bidang ekonomi merupakan kebutuhan dasar yang ingin penuhi oleh setiap orang untuk bertahan hidup.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Tengah pada dekade tahun 90-an, merupakan kebijakan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi semata (Fakih, 2002). Suatu kebijakan pembangunan yang mengandung unsur kapitalis sempit dan mengandung keserakahan dengan membuka dan mengeksploitasi sebesar-besarnya potensi ekonomi dan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan lokal serta nilai-nilai budaya setempat. Kehidupan dan kepentingan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat pun turut dikesampingkan. Kebijakan pembangunan yang diterapkan di Kalimantan Tengah pada saat itu adalah kebijakan pembangunan yang memberikan peluang yang sangat besar kepada kelompok-kelompok konglomerat serta elit-elit politik untuk mengelola pembangunan dan sumber daya alam guna memperoleh devisa sebesar-besarnya. Sehingga, yang terjadi adalah kelompok yang kaya menjadi semakin kaya dan masyarakat yang miskin akan tetap menjadi miskin.

Ada tiga faktor dari sisi komunitas masyarakat pedalaman atau masyarakat Dayak yang meliputi keterdesakan anggota komunitas ini dalam mencari lapangan pekerjaan ataupun mata pencaharian, antara lain (Syarif Ibrahim Alqadri, 2004:211) :

- 1) Pengalihan hak atas tanah untuk dijadikan sebagai lahan perusahaan kayu, lahan perkebunan kelapa sawit serta lahan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang mana pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat Dayak sangat kecil bahkan tidak jarang mereka tidak mendapatkan ganti rugi.
- 2) Pengeksploitasian hutan secara besar-besaran dengan menggunakan alat-alat besar dan teknologi canggih
- 3) Pengalihan fungsi lahan atau areal hutan secara sepihak melalui kebijakan atas-bawah (*top-down policy*) dari hutan milik masyarakat asli yang dilandasi oleh hukum adat yang telah berjalan selama ratusan tahun menjadi hutan produksi

Masyarakat Dayak memiliki suatu ciri yang dominan dalam mata pencaharian yaitu hampir sebagian besar masyarakat Dayak, bergantung pada kehidupan bertani atau mengolah ladang serta menjadi pencari kayu bulat. Dekade tahun 90-an, secara perlahan masuk perusahaan-perusahaan kayu besar yang mengambil paksa lahan milik masyarakat Dayak serta menggunduli hutan yang selama ini begitu lekat dalam budaya masyarakat Dayak. Hal ini telah mendesak

masyarakat Dayak, tidak hanya dalam segi budaya yang telah ada secara turun temurun tetapi juga dalam segi ekonomi mereka.

Selain itu, hutan-hutan yang telah gundul digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan perkebunan kelapa sawit lebih memilih masyarakat pendatang untuk menjadi pekerja dibandingkan masyarakat Dayak yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini tentu saja menyebabkan masyarakat Dayak yang merupakan masyarakat asli Kalimantan merasa terpinggirkan serta merasa tertinggal dalam kegiatan perekonomian di tanah mereka sendiri.

Namun demikian, sejak masuknya arus pendatang demi kepentingan ekonomi, para transmigran baik yang datang secara spontan maupun para transmigran yang datang melalui program pemerintah pusat serta masuknya perusahaan-perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan, hingga perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang dalam kegiatan pengoperasiannya tidak peka terhadap lingkungan hingga sosial budaya di sekitar mereka. Hal ini telah mengubah wajah masyarakat pedalaman karena hal ini telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Dayak yang tinggal di pedalaman dan berprofesi sebagai petani.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kalimantan Tengah tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian daerah Kalimantan Tengah tetapi juga memberikan dampak negatif, yang sangat dirasakan oleh masyarakat asli. Masyarakat asli tidak hanya merasa termarginalkan dan tersingkirkan dalam aktifitas ekonomi di tanah mereka sendiri, penghasilan masyarakat asli yang sebagian besar berprofesi sebagai petani pun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena perluasan areal perkebunan secara besar-besaran sehingga para petani tidak lagi dapat menggarap lahan milik mereka, mereka juga tidak dapat mengumpulkan hasil hutan karena hutan juga telah habis digunduli oleh para pengusaha. Keadaan ekonomi petani pun kemudian terpaksa bergantung kepada pedagang perantara dan tengkulak. Kerugian yang diderita para petani dari masyarakat asli ini ditambah dengan rasa bersalah mereka akan budaya yang mengakar dalam tradisi mereka selama ini untuk selalu menjaga, melindungi dan hidup berdampingan dengan alam terutama hutan.

Sementara, masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat pekerja keras namun masyarakat Dayak memandang masyarakat Madura sebagai warga pendatang yang tidak dapat menghargai budaya masyarakat Dayak, hal ini dianggap pula oleh masyarakat Dayak sebagai pemandangan sebelah mata terhadap harkat dan martabat masyarakat Dayak. Masyarakat Madura menurut masyarakat Dayak telah memperoleh keuntungan dengan bekerja dan mengelola tanah serta sumber daya di Kalimantan Tengah. Sejak masuknya perusahaan-perusahaan kayu, perusahaan perkebunan kelapa sawit serta perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), masyarakat Dayak memang termarginalkan. Bukan hanya karena tanah milik mereka dibeli dengan harga murah oleh perusahaan tersebut serta mengharuskan mereka untuk pindah dari tempat dimana mereka selama ini bermukim tetapi juga, perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak menjadikan warga pendatang, termasuk warga Madura untuk dijadikan karyawan dari perusahaan tersebut dibandingkan warga Dayak. Hal ini karena tingkat pendidikan dari masyarakat Dayak itu sendiri yang tergolong rendah.

Menurut Ariffadhilah dan Giay (2001) dalam Rudi Sukandar “*Negotiating Post Conflict Communication : A Case Of Ethnic Conflict In Indonesia*”, ada dua tipe pola konflik di Indonesia. *Pertama*, adalah pola konflik seperti yang terjadi di Aceh dan Papua, dimana warga lokal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dengan tujuan ingin memerdekakan diri mereka. *Kedua*, adalah pola konflik seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah, dimana masyarakat lokal atau warga asli merasa tidak puas dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan aspirasi mereka, hal ini menimbulkan rasa frustrasi bagi warga asli tersebut sehingga mereka mulai mencari pihak lain dalam hal ini warga pendatang terutama Madura untuk disalahkan atas buruknya kondisi ekonomi dan sosial yang menimpa mereka.

Hal ini serupa dengan laporan yang dibuat oleh *International Crisis Group Asia* (2001) yang mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah terjadi karena adanya friksi atau gesekan antara warga asli dengan warga pendatang yang bermigrasi ke Kalimantan Tengah, hilangnya tanah milik warga asli yang disebabkan baik karena kebijakan pemerintah terkait eksploitasi sumber daya alam maupun karena semakin banyaknya warga pendatang yang bermukim di Kalimantan Tengah, tingkat pendidikan dan pekerjaan warga asli yang rendah bila dibandingkan dengan warga pendatang, serta implementasi dari kebijakan publik dan politik dari pemerintah yang dianggap kurang efektif oleh warga asli Kalimantan Tengah. Beberapa hal ini telah menyebabkan timbulnya rasa frustrasi didalam diri masyarakat asli namun mereka tidak dapat menyurukannya kepada pemerintah sehingga mereka mencari musuh yang terlihat, yang dapat mereka jangkau yakni etnis Madura.

Etnis Dayak merasa tidak senang daerah asalnya sendiri telah di dominasi oleh etnis lain, dalam hal ini adalah masyarakat pendatang. Rasa tidak senang ini, terutama mereka tunjukkan terhadap masyarakat Madura. Seperti dalam laporan *International Crisis Group Asia*, bahwa rasa frustrasi dari masyarakat asli yang tidak bisa menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah telah membawa mereka mencari pihak lain untuk disalahkan dan musuh yang dapat mereka jangkau adalah etnis Madura. Hal ini salah satunya dikarenakan, etnis Madura merupakan etnis minoritas di Kalimantan Tengah. Selain itu menurut Ruslikan (2004) konflik di Sampit merupakan perpanjangan tangan dari konflik di Sambas, dimana konflik antara etnis Melayu dan Madura di Sambas, belum mendapatkan penanganan secara maksimal sehingga masih ada rasa dendam yang tersisa diantara etnis Madura dan warga asli Kalimantan.

Menurut Alqadrie (1991:9), merupakan harapan bagi masyarakat Dayak untuk terciptanya suatu keadaan dimana tidak ada gangguan, penguasaan dan eksploitasi dari manusia atas manusia, hingga yang ada hanya hutan yang subur dan kaya, tempat mereka dapat dengan leluasa bertani dan berkebun disekitar hutan serta mengumpulkan hasil hutan, tempat mereka dapat tinggal di rumah dan melaksanakan berbagai upacara adat tanpa dianggap “primitif” dan tempat dimana mereka dapat hidup terlepas dari ketergantungan pada orang lain.

Kondisi Politik Etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah

Kondisi politik di Kalimantan Tengah sesungguhnya hanya menjadi faktor pendukung dari pecahnya konflik Sampit pada tahun 2001. Struktur politik yang ada pada saat itu di Kalimantan Tengah dianggap belum mampu secara optimal

untuk menampung dan mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan dari masyarakat Kalimantan Tengah terutama masyarakat asli yang merasa terpinggirkan dalam sektor ekonomi dan termarginalisasi dalam bidang sosial terutama hukum. Selain itu struktur politik yang ada juga belum mampu memfasilitasi berbagai proses politik dan hubungan kelembagaan yang demokratis. Lembaga-lembaga politik yang ada juga belum mampu bekerjasama secara efektif dengan berbagai organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat serta kelompok kepentingan lainnya. Kondisi seperti ini telah menyebabkan timbulnya situasi instabilitas politik dan keamanan di Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh ketidakpuasan sosial (*social discontent*).

Peran penyelenggara negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang bersih dan profesional menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan struktur politik yang dapat berjalan secara efektif untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dari masyarakat. Namun kondisi ketidakpuasan sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah yang disebabkan tidak berjalannya secara maksimal peran penyelenggara negara tidak terlepas dari beberapa permasalahan antara lain, masih kurang berfungsinya sistem akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara, menurunnya etika dan moral penyelenggara negara serta aparat hukum yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum menciptakan suatu sistem yang berjalan dan berlaku secara adil (Heru Cahyono, 2002:134).

Menurut Alqadrie (2004, 211), sampai dengan era otonomi daerah dengan dikeluarkannya UU nomor 22/1999 dan UU nomor 25/1999, ada persamaan mendasar dari keempat provinsi di Kalimantan termasuk Kalimantan Tengah, yang mana mereka belum memperoleh otonomi daerah secara luas dan penuh. Hampir semua bidang dan sektor yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk bidang ekonomi yang meliputi sektor pertanian, perkebunan dan juga kehutanan; bidang politik yang mencakup sektor pemerintahan, terutama urusan yang berhubungan dengan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS), termasuk guru-guru negeri yang semuanya dilaksanakan serta diatur oleh pemerintah pusat.

Ketiadaan otonomi dan dominasi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Tengah turut berperan menyebabkan terciptanya struktur politik yang tidak efektif dan belum mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Selain itu, ada pula sistem penjatahan atau *dropping* bagi para pemimpin daerah seperti Gubernur bahkan Bupati. Sistem ini dianggap sebagai suatu kekerasan yang mana menurut konsep Fisher, hal ini termasuk dalam kekerasan struktural yang melembaga.

Menurut Rudi Sukandar tiap warga asli suatu daerah berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri. Hal ini secara tidak langsung akan menyuarakan hak-hak mereka untuk membangun daerah mereka masing-masing. Kita kemudian mengenal istilah Putra Daerah untuk menggambarkan warga asli yang kemudian menjadi pemimpin di daerahnya sendiri. Putra Daerah sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan warga dari suku asli disuatu daerah yang kemudian menjadi pemimpin dari daerah tersebut. Di Kalimantan Tengah sendiri, berkat adanya sistem penjatahan bagi para Gubernur dan Bupati maka Kalimantan Tengah kerap kali dipimpin oleh warga non-dayak. Tercatat sejak tahun 1957 hingga saat

ini, provinsi Kalimantan Tengah telah 12 kali berganti Gubernur dan baru pada periode tahun 2005 hingga 2010, Kalimantan Tengah untuk pertama kalinya dipimpin oleh warga dari etnis dayak atau putra daerah Kalimantan Tengah yakni Bapak Agustin Teras Narang, S.H, yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah untuk periode kedua.

Masyarakat dayak tidak hanya termarginalkan dalam segi ekonomi tetapi juga dalam bidang politik, hal ini salah satunya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan mereka serta menurut King (1993), masyarakat dayak dapat dibagi kedalam dua golongan menurut mata pencahariannya, dimana tiap-tiap golongan memiliki karakteristiknya masing-masing untuk menjalani dan menghargai hidup berdampingan dengan alam sesuai dengan sistem budaya dan kepercayaan mereka. *Pertama*, adalah kelompok masyarakat dayak yang tinggal dihutan, mereka hidup dengan berburu dan bertani. *Kedua*, adalah kelompok masyarakat dayak yang tinggal dipesisir, yang hidup sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dayak berprofesi sebagai petani atau sebagai nelayan, sehingga baik bidang perekonomian maupun politik di Kalimantan Tengah menjadi lebih banyak dijalankan dan didominasi oleh warga pendatang.

Menurut Rudi Sukandar, setelah konflik Sampit pecah di tahun 2001, secara perlahan masyarakat Dayak mulai merubah cara hidup serta kebiasaan yang selama ini kerap kali mereka lakukan. Salah satunya adalah dengan mulai berkompetisi untuk mencari pekerjaan selain hanya sebagai petani, berburu hasil hutan maupun nelayan. Masyarakat Dayak pasca konflik Sampit mulai mengubah kebiasaan mereka dan turut berkompetisi bersama-sama dengan warga pendatang lainnya untuk mencari pekerjaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Dayak menolak untuk termarginalkan di tanah mereka sendiri sehingga mereka harus merubah kebiasaan mereka selama ini dan beradaptasi dengan kondisi Kalimantan Tengah yang baru.

Kembali kepada kondisi Kalimantan Tengah sebelum konflik pecah di tahun 2001, hal ini menimbulkan rasa tidak puas dalam diri masyarakat Kalimantan Tengah terutama masyarakat Dayak dengan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat asli dengan warga pendatang yang membuat mereka secara perlahan harus tersingkir dan terpinggirkan di tanah mereka sendiri serta perbedaan budaya yang ada antara masyarakat Dayak dan juga masyarakat Madura ditambah tidak ditemukannya keadilan hukum di tanah tersebut yang didukung pula oleh peran pemerintah daerah yang tidak berjalan secara maksimal yang menyebabkan struktur politik yang ada di Kalimantan Tengah tidak berjalan secara efektif dalam menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk kemudian memprosesnya dan mengeluarkan *output* berupa kebijakan, hal ini telah menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat asli Kalimantan Tengah yang menyebabkan tereskalasinya konflik laten yang ada di Kalimantan Tengah hingga kemudian berubah menjadi konflik terbuka yang diwarnai dengan tindak kekerasan.

Analisa Akar Konflik Sampit

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akar konflik Sampit adalah mengenai pertentangan budaya yang saling berlawanan antara etnis Dayak dan Madura, dimana kedua etnis yang bertikai ini tidak mampu berakulturasi dengan baik. Hal ini terjadi salah satunya karena warga Madura hidup mengelompok

dengan sesama warga Madura itu sendiri, hampir sebagian besar dari mereka hidup dalam desa-desa yang terpisah dengan etnis-etnis lainnya. Kondisi ini didukung oleh kondisi ekonomi di Kalimantan Tengah terkait perebutan sumber daya yang menyebabkan masyarakat asli yakni etnis Dayak merasa tersingkir dan termarginalisasi ditanah mereka sendiri karena warga pendatang utamanya warga Madura lebih sukses dari mereka.

Selain itu lahan dan tanah milik warga Dayak kerap kali direbut oleh warga pendatang, hal ini menimbulkan sentimen negatif bagi orang Dayak terhadap orang Madura. Sentimen negatif yang ditambah rasa cemburu karena masyarakat Madura dirasa lebih sukses dibandingkan warga Dayak ini, diperparah pula dengan lembaga penegak hukum yang tidak mampu berlaku adil saat pertikaian yang melibatkan etnis dayak dan madura terjadi selain itu lemahnya struktur politik yang ada di Kalimantan Tengah telah menimbulkan rasa kecewa bagi masyarakat Dayak dan turut menjadi faktor pendukung tereskalasinya konflik laten di Kalimantan tengah.

Menurut Coser, jika diimplementasikan dalam permasalahan konflik antara suku Dayak dan Madura, maka dapat dibagi menjadi dua jenis konflik yakni :

1. Konflik Realistis, yakni suatu konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan antara masyarakat dengan obyek yang dituju atau dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak sebagai warga asli Kalimantan merasa kecewa karena dalam permasalahan penguasaan sumber daya, masyarakat Dayak merasa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan kebijakan yang diskriminatif karena telah mengeksploitasi kekayaan alam terutama hutan, yang mana bagi kepercayaan masyarakat Dayak, hutan adalah cerminan dari tuhan mereka yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara besar-besaran tidak hanya telah merugikan masyarakat Dayak namun juga telah mencederai nilai-nilai budaya setempat. Selain itu sikap para penegak hukum yang dirasa tidak mampu berlaku adil saat terjadi pertikaian antara etnis Dayak dan Madura juga telah memperparah rasa kecewa dan juga rasa tidak percaya oleh masyarakat Dayak.
2. Konflik Non- Realistis, dimana konflik dalam hal ini bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan akan tetapi lebih kepada untuk meredakan ketegangan atau dengan kata lain konflik harus dieskalasi untuk menjadi konflik terbuka agar dapat diselesaikan dan konflik laten dapat dihilangkan. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi sangat signifikan tidak hanya dalam kapasitasnya untuk mencegah pecahnya konflik akan tetapi juga dalam kapasitasnya dalam mencegah agar konflik yang lebih besar tidak berlangsung berlarut-larut dan tidak menyebar ke wilayah lain. Struktur politik yang ada di Kalimantan Tengah telah terbukti tidak mampu melakukan keduanya. Struktur politik di Kalimantan Tengah telah menyebabkan ketidakpuasan sosial, hal ini terjadi karena lembaga-lembaga politik yang ada belum mampu bekerjasama secara efektif dengan berbagai organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat serta kelompok kepentingan lainnya. Padahal peran pemerintah daerah yang bersih dan profesional menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan struktur politik yang dapat berjalan efektif untuk mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Ketidampampuan pemerintah daerah untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lokal turut berperan sehingga konflik terbuka pun tidak dapat dihindari, dan setelah konflik pertama kali pecah di Sampit, secara cepat konflik

tersebut menyebar ke Pangkalan Bun dan Palangkaraya, hal ini karena lemahnya peran negara dan peran aparat keamanan untuk mencegah agar konflik serupa tidak menyebar ke daerah lain di Kalimantan Tengah.

Sementara jika menganalisa konflik di Sampit menggunakan teori deprivasi yang ditawarkan oleh Robert Tedd Gurr, dimana ada tiga jenis deprivasi, yakni *Decremental Deprivation*, *Aspirational Deprivation* serta *Progressive Deprivation*. Deprivasi sendiri adalah kondisi dimana terjadi kesenjangan antara harapan dan kemampuan untuk memenuhinya yang akan menyebabkan rasa frustrasi di masyarakat dan akan membawa masyarakat untuk bertindak agresif hingga timbul konflik terbuka. Dalam konflik sampit, deprivasi yang terjadi adalah *Aspirational Deprivation* yakni suatu kondisi dimana adanya peningkatan harapan yang tidak bisa diimbangi oleh kemampuan untuk memenuhi harapan tersebut. Sehingga muncul rasa frustrasi karena ketidakmampuan memenuhi harapan yang baru saja dikembangkan. Adapun hal yang mendorong peningkatan harapan tersebut adalah : (a). Efek demonstratif dari cara hidup baru, (b). Ideologi atau keyakinan baru, (c). Dampak dari perbaikan status sosial dan ekonomi.

Dari ketiga faktor yang mendorong peningkatan harapan hidup yang diutarakan oleh Robert Ted Gurr melalui *Aspirational Deprivation*, peningkatan harapan hidup yang dirasakan oleh masyarakat Dayak terjadi karena dampak dari perbaikan status sosial dan ekonomi serta efek demonstratif dari cara hidup yang baru. Masyarakat Dayak yang sebagian besar tinggal dipedalaman hutan Kalimantan harus beradaptasi dengan cara hidup yang baru ketika mereka terpaksa meninggalkan kebiasaan lama mereka karena eksploitasi hutan secara masif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Eksploitasi hutan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri namun sayang dampak dari eksploitasi hutan ini sendiri dirasakan lebih banyak merugikan masyarakat asli Kalimantan Tengah. Hutan yang seharusnya dijaga, dipelihara dan dilestarikan terpaksa dihancurkan demi kesejahteraan sebagian pihak, bagi masyarakat Dayak sendiri, hal ini sama saja dengan menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi dan juga budaya mereka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Dayak berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya diskriminatif tetapi juga telah membuat masyarakat Dayak termarjinalkan di tanah mereka sendiri.

Rasa frustrasi yang dirasakan oleh masyarakat Dayak atas peningkatan harapan yang tidak bisa diimbangi oleh kemampuan untuk memenuhi harapan tersebut salah satunya karena masyarakat asli tidak mampu menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah sehingga untuk menyuarakan rasa frustrasi mereka, masyarakat Dayak mencari musuh yang terlihat yakni etnis Madura. Mengapa etnis Madura yang dijadikan subyek serangan masyarakat Dayak? hal ini tidak terlepas dari stereotipe negatif yang terbangun dibenak masyarakat Dayak terhadap masyarakat Madura. Diantara kemajemukan etnis yang ada di Kalimantan Tengah, etnis Dayak sebagai warga asli Kalimantan Tengah tidak dapat berakulturasi dan koeksistensi dengan baik dengan warga Madura. Stereotipe negatif ini didukung dengan rasa cemburu yang dirasakan oleh masyarakat Dayak terhadap warga pendatang utamanya masyarakat Madura yang dianggap lebih sukses dalam mengelola sumber daya lokal. Selain itu adapula rasa dendam akibat dari konflik Sambas yang pernah terjadi di Kalimantan Barat dan belum terselesaikan secara tuntas.

Masuknya warga pendatang yang turut diikuti oleh masuknya beberapa perusahaan-perusahaan yang siap mengeksplor sumber daya alam di Kalimantan tengah, tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak bagi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kalimantan tengah. Ada masyarakat yang diuntungkan dan ada pula masyarakat yang dirugikan, namun kondisi ini telah membuat masyarakat Kalimantan Tengah memiliki tingkat harapan yang semakin meningkat dari sebelumnya namun struktur politik yang ada di Kalimantan Tengah tidak dapat mewujudkan hal tersebut. Buruknya struktur politik yang ada di Kalimantan tengah telah membuat pemerintah daerah tidak dapat mengartikulasikan kepentingan masyarakat secara efektif sehingga harapan dari masyarakat yang begitu tinggi dibalas dengan pemenuhan dari pemerintah daerah yang konstan sehingga menimbulkan deprivasi atau kesenjangan yang berangkat dari rasa kecewa menjadi rasa frustrasi dan mengescalasi konflik laten menjadi konflik terbuka.

Kesimpulan

Konflik Sampit antara etnis Dayak dan Madura secara garis besar dapat dikatakan sebagai konflik etnis, namun apabila dianalisa secara lebih mendalam etnis ternyata hanya menjadi selubung untuk faktor-faktor politik dan ekonomi. Konflik Sampit tereskalasi karena adanya deprivasi yang menggiring rasa frustrasi masyarakat Dayak. Rasa frustrasi terhadap pemerintah daerah yang telah memarjinalkan warga Dayak ditanah kelahiran mereka sendiri. Rasa frustrasi ini kemudian dialihkan kepada warga Madura sebagai musuh terlihat bagi masyarakat Dayak. Pemilihan masyarakat Madura sebagai musuh terlihat juga tidak terlepas dari stereotipe negatif yang terbangun diantara masyarakat Dayak terhadap masyarakat Madura.

Pembentukan stereotipe akan identitas tertentu memang telah menjadi *human nature*, namun stereotipe negatif tidak akan serta merta tereskalasi menjadi konflik tanpa adanya *trigger* atau pemicu. Dalam konflik Sampit, pemicu tereskalasinya konflik laten adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi peningkatan harapan masyarakat serta lemahnya peran aparat keamanan negara yang menyebabkan ketika konflik menjadi terbuka, masyarakat memilih untuk menggunakan kekerasan terbuka. Berangkat dari analisa tersebut tentu saja dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konflik Sampit akan dapat dihindari apabila tidak ada kondisi deprivasi yang dirasakan oleh masyarakat serta apabila peran lembaga penegak hukum dan aparat keamanan negara dapat lebih kuat lagi.

Daftar Pustaka

- Alqadri, Syarif Ibrahim. 2004. *Potret Retaknya Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: CSPS Book.
- Anonim. t.t. *Buku Merah: Konflik Etnik Sampit, Kronologi, Kesepakatan, Aspirasi Masyarakat, Analisis & Saran*. Tersedia di: www.crisisgroup.org. Diakses pada 24 Januari 2018.
- Cahyono, Heru. 2002. *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. P2P LIM.
- Fisher, Simon. 2009. *Responding To Conflict*. London : The British Council.
- Gurr, Robert Ted. 1970. *Why Men Rebel*. Princeton University Press.
- Surata, Agus. 2001. *Atasi Konflik Etnis*. Global Pustaka Utama.